

**PENGARUH MODAL TERHADAP VOLUME USAHA KOPERASI  
DI KOTAMADYA SAMARINDA**

OLEH :

**MUHAMMAD YUSUF**

NIM : 95110260



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH  
SAMARINDA**

**1998**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENGARUH MODAL TERHADAP VOLUME USAHA  
KOPERASI DI KOTAMADYA SAMARINDA  
Nama Mahasiswa : MUHAMMAD YUSUF  
N I M : 95110260  
N I R M : 95.11.311.401101.01477  
Jurusan : Manajemen

Menyetujui,

Pembimbing I



H. KAHARUDDIN ANAS, SE, SU

Pembimbing II



DRS. H. SABRI NURDIN

Mengetahui

Ketua STIE Muhammadiyah  
Samarinda

DRS. H.M. ARIFIN

## RINGKASAN

MUHAMMAD YUSUF Pengaruh Modal Terhadap Volume Koperasi Kotamadya Samarinda, dibawah bimbingan H. Kaharuddin Anas, SE. SU. dan H. Sabri Nurdin, SE.

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Modal Terhadap Volume Usaha Koperasi di Kotamadya Samarinda, serta untuk mengetahui keeratan hubungan tersebut.

Dalam pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian, terdapat suatu keadaan dimana modal koperasi berpengaruh dan berkorelasi dengan volume usaha koperasi di Kotamadya Samarinda.

Dengan demikian, koperasi di Kotamadya Samarinda untuk menambah modal perlu juga menambah jumlah anggotanya, sehingga terdapat akumulasi orang dan modal yang siap untuk melaksanakan aktifitas perkoperasian di Kotamadya Samarinda.

## RIWAYAT HIDUP

MUHAMMAD YUSUF, Lahir pada tanggal 14 Agustus 1976 di Samarinda, Kalimantan Timur. Penulis adalah anak kedua dari 7 (tujuh) bersaudara dari pernikahan Bapak H. Wahyuddin dengan Ibu Hj. Halijah.

Pendidikan formal yang ditempuh, Sekolah Dasar dimulai tahun 1982 dan tamat dengan berijazah pada tahun 1988. Selanjutnya meneruskan ke Sekolah Menengah Pertama dimulai pada tahun 1988 dan tamat pada tahun 1991. Dan pada sekolah tingkat atas, penulis memulai pada tahun 1991 dan tamat pada tahun 1994.

Pendidikan di Perguruan Tinggi dimulai pada tahun 1994 pada salah satu Akademi di Samarinda dan pada tahun 1995 penulis transfer ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda Jurusan Manajemen.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat serta karunia-Nya jualah, hingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengambil judul "Pengaruh Modal Terhadap Volume Usaha Koperasi di Kotamadya Samarinda".

Dalam penulisan ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa, tiadalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada Bapak H. Kaharuddin Anas, SE, SU, selaku dosen pembimbing I, dan kepada Bapak H. Sabri Nurdin, SE selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran untuk mengarahkan penulis di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya, meskipun dengan segala daya dan upaya yang penulis lakukan dalam menyelesaikannya, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi penulis.

Semoga semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan selama ini akan mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT,

akhirnya penulis berharap semoga dalam mengarungi kehidupan ini selalu mendapat ridho dan rizki yang halal dari Allah SWT. Amin.

Samarinda,

Penulis

M. YUSUF

NIM. 95110260

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN RINGKASAN .....	iii
RIWAYAT HIDUP .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II DASAR TEORI</b>	
A. Teori Ekonomi Koperasi .....	9
1. Pengertian Tentang Modal Koperasi ...	9
2. Perlunya Volume Usaha Koperasi .....	20
B. Hipotesis .....	37
C. Definisi Konseptual .....	38
<b>BAB III METODE PENDEKATAN</b>	
A. Definisi Operasional .....	40
B. Perincian Data Yang Diperlukan .....	41

C. Jangkauan Penelitian .....	41
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	42
E. Alat Analisis Dan Pengujian Hipotesis ..	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Tinjauan Umum Daerah TK.II Samarinda ...	46
1. Letak Geografis .....	46
2. Luas Wilayah Dan Pembagian Daerah Kerja .....	46
B. Keadaan Dan Perkembangan Koperasi Di Kotamadya Samarinda .....	48
C. Perkembangan Modal Di Volume Usaha Koperasi Di Kotamadya Samarinda .....	59
D. Struktur Organisasi .....	61
<b>BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis .....	64
B. Pembahasan .....	68
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Tubuh Utama	Halaman
1.	Luas Wilayah Dan Pembagian Daerah Kerja .....	47
2.	Pembagian Wilayah Administrasi Kelurahan .....	47
3.	Jenis Dan Jumlah Koperasi KUD Dan Non KUD Di Kotamadya Samarinda Tahun 1997 .....	49
4.	Pelaksanaan RAT Koperasi Unit Desa Dan Koperasi Non KUD Tahun 1997 .....	51
5.	Permohonan Koperasi Dalam Badan Hukum Koperasi Tahun 1997 .....	53
6.	Klasifikasi Koperasi Di Kotamadya Samarinda Tahun 1997 .....	55
7.	Perkembangan Koperasi Unit Desa Di Kotamadya Samarinda Tahun 1997 .....	57
8.	Perkembangan Koperasi Unit Desa Non KUD Di Kotamadya Samarinda Tahun 1997 .....	58
9.	Jumlah Modal Dan Volume Usaha Koperasi Di Kotamadya Samarinda Tahun 1997 Dalam Rupiah ...	59
10.	Jumlah Modal Dan Volume Usaha Koperasi Non KUD Di Kotamadya Samarinda Tahun 1997 Dalam Rupiah	60
11.	Jumlah Metode KUD Dan Non KUD Serta Volume Usaha Tahun 1997 .....	61
12.	Jumlah Tenaga Kerja Koperasi Di Kotamadya Samarinda Tahun 1997 .....	63
13.	Analisis Regresi Modal Koperasi Terhadap Volume Usaha Koperasi Di Kotamadya Samarinda .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Tubuh Utama	Halaman
1.	Struktur Organisasi Dan Jumlah Tenaga Kerja Pada Koperasi Kotamadya Samarinda .....	62

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana yang tercantum di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988, Pembangunan Nasional tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi lebih mendasar ditujukan untuk melepaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dalam usaha menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri. Di samping itu dapat berswadaya yang tangguh dan mapan untuk menjaga kelangsungan hidup menuju kejayaan Bangsa dan Negara.

Hal ini dimaklumkan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk keterbelakangan dan menjadikan manusia Indonesia yang mempunyai potensial, menuju kepada masyarakat adil dan makmur berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka melepaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dari Pelita ke Pelita berikutnya (pola umum pembangunan jangka panjang) yang menitik beratkan kepada sektor ekonomi yang ditunjang dengan faktor lainnya.

Saat sekarang ini telah dirasakan bersama manfaat dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah

dengan ikut sertanya masyarakat, berpartisipasi secara aktif dalam usaha mensukseskan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, segala sumber daya dan potensi lain merupakan modal dasar dari Pembangunan Nasional yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemajuan Bangsa dan Negara.

Garis-Garis Besar Haluan Negara menjelaskan : "Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan modal dasar dan faktor yang dominan dalam menunjang kelancaran suatu pembangunan Nasional di segala bidang."<sup>1)</sup>

Tujuan yang hakiki dari pada pembangunan Nasional tersebut ialah guna menciptakan dan mewujudkan suatu cita-cita bangsa Indonesia yaitu menginginkan suatu masyarakat adil dan makmur serta sejahtera baik material maupun spiritual.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, Drs. I Nyoman Baratha mengatakan : "sekitar 60 % dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan".<sup>2)</sup>

Untuk menggali potensi yang ada didaerah pedesaan dan sumber daya yang ada guna memperbaiki kehidupan masyarakat dalam menuju kehidupan yang lebih mapan,

---

1) Anonim, Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, P4, Undang-Undang Dasar 1994, GBHN Jakarta.

2) I Nyoman Baratha, Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 1

diperlukan suatu lembaga atau suatu badan usaha perekonomian seperti koperasi.

Koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat Indonesia yang bertujuan membantu masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik.

Hal ini ditegaskan oleh Bapak Presiden dalam pesannya pada peringatan hari Koperasi yang ke 38 pada tanggal 12 Juli 1985 yaitu :

Koperasi harus kita bangun, karena koperasi merupakan wadah yang paling tepat untuk menghimpun kekuatan ekonomi mereka yang kecil-kecil dan lemah. Secara sendiri-sendiri kekuatan ekonomi kecil-kecil ini akan lemah, akan tetapi jika mereka bergabung bersama, maka kekuatan ekonomi yang kecil-kecil ini akan berubah dan akan menjadi kerangka landasan masyarakat adil dan makmur untuk memanfaatkan landasan tersebut dalam repelita V sehingga dalam Repelita VI nanti pembangunan kita dapat memasuki tahap tinggal landas menuju masyarakat yang adil dan makmur.<sup>3)</sup>

Dalam menubnjang keberhasilan pembangunan perekonomian, koperasi dapat dijadikan sebagai kekuatan ekonomi yang benar-benar dapat diandalkan. Tanpa koperasi yang kuat dan mapan yang selalu memupuk rasa kesadaran untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dan menampung semua hasil usaha di dalam koperasi, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan itu masih belum berhasil.

---

3) Anonim, Departemen Koperasi Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi, Pesan Presiden Soeharto pada hari Koperasi ke 38 tahun 1985, halaman 13-14.

Koperasi merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berazaskan kekeluargaan dan kegotong royongan yang merupakan ciri khas dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Koperasi bukan hanya suatu kumpulan orang-orang tetapi juga suatu bentuk usaha ekonomi yang harus dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu juga didirikan bukan untuk mencari laba sebesar-besarnya, badan usaha ini termasuk organisasi yang non profit, tujuannya untuk melayani kepentingan anggota. Tetapi bukan berarti koperasi tidak perlu keuntungan sebaliknya justru koperasi perlu sekali memperhatikan efisiensi, menekan biaya hingga dapat melayani kebutuhan anggotanya untuk berfikir dan bertindak secara ekonomis.

Untuk meningkatkan perkembangan usaha yang tangguh diperlukan suatu sistem manajemen yang baik bagi pengelolaan atau pengurusnya dan didukung dengan kesadaran anggota untuk melunasi simpanan-simpanan yang telah ditentukan. Perkembangan volume usaha koperasi memerlukan modal yang benar-benar cukup dan kuat, tanpa didukung oleh modal setiap usaha tidak mungkin akan berkembang dengan baik, bahkan tidak akan berjalan.

Telah dipahami semua bahwa upaya untuk memperkokoh dan memperkuat kehidupan koperasi agar benar-benar mampu

memerlukan perjalanan yang masih panjang, tidak terlepas dari istilah sepi dari segala macam tantangannya. Di dalam proses perkembangan yang masih panjang itu akan timbul segala macam permasalahan yang tengah melanda kehidupan koperasi, maka tidak seharusnya kita bersikap masa bodoh atau bersikap skeptis terhadap segala permasalahan tersebut, tetapi justru harus dihadapi sebagai suatu tantangan yang harus dipecahkan dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Seperti halnya dijelaskan berikut ini :  
Masyarakat masih belum yakin bahwa koperasi-koperasi Unit Desa dapat membantu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan perbaikan hidup, karena performance koperasi yang masa lampau.<sup>4)</sup>

Untuk menanamkan kepercayaan kepada masyarakat, pengurus koperasi harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi dan mampu merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam berbagai aspek kehidupan dan usahanya serta sistem manajemen yang baik pula.

Berkaitan dengan masalah secara umum tersebut di atas, maka kurang berhasilnya koperasi di dalam meningkatkan volume usahanya tidak saja tergantung dari seberapa besar modal yang digunakan, akan tetapi disebabkan juga oleh beberapa faktor antara lain :

---

4) Anonim, Evaluasi Kegiatan Pembangunan Pelita III Departemen Perdagangan dan Koperasi, Kalimantan Timur 1982, halaman 5.

1. Pengurus kurang mampu melihat potensi dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
2. Kurang pendekatan dengan pihak swasta untuk memperoleh dukungan modal.
3. Kurangnya penerangan dan penyuluhan kepada para anggota dan masyarakat.
4. Pemanfaatan modal yang ada belum dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dalam hal ini sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan volume usaha koperasi, namun yang penulis anggap paling dominan adalah modal.

Sebagaimana diketahui bersama modal mempunyai peranan untuk setiap usaha, dengan modal yang besar usaha koperasi dapat berkembang baik dari suatu bidang ke bidang lainnya yang dianggap corak perkembangannya. Selain itu anggota-anggota koperasi diharapkan menyimpan uangnya secara tetap dan teratur sesuai dengan ketentuan koperasi, sehingga tidak menghambat perkembangan usaha koperasi.

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik menentukan judul skripsi sebagai berikut : ***"Pengaruh Modal Terhadap Perkembangan Volume Usaha Koperasi di Kotamadya Samarinda."***

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut karena adanya permasalahan yang penulis anggap sangat baik

sekali untuk diungkapkan dan dituangkan dalam bentuk skripsi, karena telah kita ketahui bersama bahwa masalah modal ini sangat penting sekali di dalam meningkatkan volume usaha, tanpa modal maka suatu usaha bentuk usaha apapun tidak akan berkembang begitu pula dengan koperasi tidak terlepas dari masalah modal dalam meningkatkan volume usahanya. Dan sasaran penulis dalam penulisan ini adalah di daerah Kotamadya Samarinda karena penulis ingin melihat dan membuktikan bagaimanakah peranan modal tersebut didalam meningkatkan perkembangan volume usaha koperasi khususnya di Kotamadya Samarinda, karena penulis sebagai putra daerah harus mampu dan tanggap terhadap keadaan di daerahnya dan disini penulis tertarik dengan koperasi terutama masalah permodalan yang dihubungkan dengan perkembangan volume usahanya.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, yaitu salah satu faktor yang menghambat perkembangan volume usaha koperasi adalah permodalan, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan adalah :

"Apakah modal mempunyai peranan yang berarti di dalam meningkatkan volume usaha koperasi di Kotamadya Samarinda".

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dalam penelitian dan penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peranan modal dalam meningkatkan volume usaha koperasi di Kotamadya Samarinda.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pengurus koperasi di Kotamadya Samarinda dalam pengelolaan dan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan diambil.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda (STIEM).

## BAB II

### DASAR TEORI

#### A. Teori Ekonomi Koperasi

##### 1. Pengertian Tentang Modal Koperasi

Kunci keberhasilan suatu koperasi sangat ditentukan dari bagaimana pengelolaan organisasi, usaha maupun keuangannya. Hal ini tergantung dari kemampuan dan ketanggungan para pengelola koperasi itu sendiri.

Sejalan dengan itu, diperlukan suatu ketelitian, keuletan dan pengendalian yang tegas dalam pengelolaan keuangan koperasi sehingga dapat tercapai prinsip efisiensi dan efektifitas koperasi.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi koperasi yaitu, kesulitan menghimpun dana atau modal yang jumlahnya cukup dalam waktu singkat baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Hal ini antara lain disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap koperasi masih kurang akibat berbagai kasus yang sering terjadi. Disamping itu masih kecilnya tingkat pendapatan para anggota yang umumnya golongan ekonomi lemah, masih kurangnya pengetahuan, keterampilan dan pengabdian para pengelola koperasi, tata cara pengelolaan simpanan atau pinjaman yang kurang praktis.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan penulis sajikan pengertian modal koperasi. Seperti yang

dijelaskan dalam Bulletin Koperasi yaitu : "Modal adalah uang atau barang sebagai masukan yang bersama-sama masukan lain (alam, tenaga kerja) menghasilkan out put (produk yang diinginkan) baik berupa barang maupun jasa".<sup>5)</sup>

Sehubungan dengan modal koperasi penggunaannya tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi sebagai perkumpulan orang. Yang dicandangkan bahwa kehidupan koperasi pada dasarnya ditentukan oleh keaktifan kerja anggota keseluruhan secara individu maupun secara bersama-sama yang mengutamakan unsur manusiawi. Dalam hal ini bukan berarti faktor modal yang tidak berperan sama sekali, sebab sebagai badan usaha ekonomi koperasi memerlukan modal untuk kegiatan usahanya.

Sesuai dengan uraian di atas, G. Kartasapoetra dan kawan-kawan mengatakan :

Koperasi sebagai alat sosial dan alat ekonomis haruslah menjalankan usaha (business) dengan demikian modal mempunyai kedudukan vital, tetapi dengan pengertian bahwa modal tersebut tidak boleh diberi arti yang lebih penting dari pada kepentingan orang-orang yang menjadi anggotanya. Jelasnya kalau modal yang akan dipergunakan usahanya itu akan menjadi koperasi tersebut jatuh ke bawah pengaruh kaum modal atau menjadikannya ketergantungan, maka

-----  
5)

Anonim, Bulletin Koperasi, Direktorat Jenderal Bina Lembaga Departemen Koperasi, Jakarta, Edisi Juli, Agustus, September 1990, halaman 9

modal demikian harus ditolak karena kepentingan anggota lebih penting dari pada modal.<sup>6)</sup>

Jadi dalam penggerakkan dibidang usaha dari koperasi harus bersifat business, hal ini memang diperlukan modal sebab tanpa modal business itu tidak mungkin akan jalan. Namun dalam hal ini modal tidak boleh diberikan sebagai arti yang penting, dimana akan berpengaruh kepada orang-orang memiliki modal dan koperasi kebersamaan anggota dalam berpartisipasi aktif menanamkan modalnya yang mempunyai peranan penting.

Lebih lanjut beliau mengatakan : "Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, bukan merupakan perkumpulan modal".<sup>7)</sup>

Memang pada dasarnya batasan ini sering menimbulkan suatu pertanyaan yang kadang tidak dimengerti karena memberikan pengertian yang sempit bagi sementara orang. Dimana orang berpendapat demikian jelas memandang koperasi dengan menitik beratkan pada fungsi koperasi sebagai alat sosial tanpa memandang koperasi sebagai alat ekonomi.

---

6) G. Kartasapoetra dkk, Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945, Bina Aksara, Jakarta, halaman 162

8) I b i d

Sistem kegiatan ekonomi dibedakan benar-benar dengan praktek dari kegiatan dari perusahaan-perusahaan yang semata-mata mengejar laba. Karena anggaran dasar atau tentang ketentuan-ketentuan organisasi perkumpulan koperasi dan cara pengelolaan bersifat demokratis yang berbeda. Perbedaan itu timbul disebabkan karena cara-cara penentuan atau pengaturan sisa hasil usaha yang telah dicapai oleh koperasi, dibagi oleh para anggota-anggotanya.

Koperasi sebagai badan usaha bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya karena sumber permodalan utamanya juga berasal dari para anggota dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela.

Sehubungan dengan modal koperasi berasal dari anggota dalam bentuk simpanan pokok, wajib dan suka rela, Dra. Ninik Widyanti dan Y.W. Sunindhia, SH hal tersebut berkaitan dengan beberapa alasan, yaitu :

a. Alasan Kepemilikan

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.

b. Alasan Ekonomi

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara efisien dan murah, karena tidak dikenakan persyaratan bunga.

c. Alasan Resiko

Modal sendiri/anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibanding dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.<sup>8)</sup>

Dari uraian alasan tersebut di atas, modal sendiri memang mengandung beberapa hal yang positif, namun harus dibarengi dengan pengelolaan atau pengadministrasian modal itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjamin keamanannya.

Ketidajelasan administrasi apalagi sampai terjadi penyalahgunaan modal dari anggota, akan dapat mengakibatkan mengurangi atau menghancurkan kepercayaan anggota kepada pengurusnya.

Besar kecilnya lapangan usaha koperasi tergantung pada besar kecilnya modal anggota. Perkumpulan koperasi mempunyai dua aspek, yaitu aspek sosial merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama dan aspek usaha ekonomi dalam bentuk kerjasama ekonomi yang berusaha di bidang pertanian, jual beli barang konsumsi, kerajinan industri dan lain-lain.

Untuk mendapatkan keringanan dalam kehidupan, aspek itu diperhitungkan secara efisiensi dan unsur-unsur laba, rugi, sedang aspek sosial lebih mengutamakan majunya suatu koperasi.

---

8) Ninik Widyanti dan Y.W. Sudindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989

Dimana beliau lebih lanjut mengatakan : "modal adalah suatu alat faktor yang berguna untuk produksi lebih lanjut, alat-alat dan pengertian modal termasuk juga uang jasa dan lain-lain."<sup>9)</sup>

Seperti halnya diketahui bersama modal selalu menjadi hambatan bagi koperasi, karena pada umumnya hanya orang-orang yang benar-benar sadar dan mengerti akan pentingnya koperasi yang mau menanamkan modalnya di koperasi, sedangkan bagi yang lain, lebih baik menanamkan modalnya di bank-bank, karena biasanya bank memberikan bunga relatif lebih tinggi dibanding dengan koperasi.

Selain itu umumnya anggota-anggota koperasi adalah orang-orang yang kekurangan modal. mereka masuk koperasi justru bermaksud menarik keuntungan atau setidaknya dapat membantu kehidupan mereka.

Supaya dapat dimengerti lebih jelas tentang permodalan dalam koperasi, maka di dalam bulletin koperasi edisi Juli, Agustus dan September 1990, sesuai dengan sumbernya modal di dalam koperasi dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Yang berasal dari dalam, yakni :
  - a. Simpanan anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela serta jenis-jenis simpanan lainnya.

-----  
9)

I b i d, halaman 139.

- b. Cadangan, yakni bagian dari sisa hasil usaha yang biasanya disisihkan setiap tahun. Cadangan ini dipergunakan untuk menutupi apabila koperasi menderita kerugian dikemudian hari.
  - c. Sisa hasil usaha yang belum dibagikan. Sisa hasil usaha tahun lalu yang akan dibagikan umumnya masih menunggu beberapa lama sejak neraca koperasi di syahkan oleh rapat anggota tahunan. Selama itu pula koperasi dapat menggunakannya untuk membelanjai kegiatan usahanya.
2. Yang berasal dari luar, yakni sumber permodalan yang berasal dari pihak lain atau dari luar organisasi koperasi, dapat berupa :
- a. Bantuan atau dorasi, subsidi, hibah atau hadiah.
  - b. Kredit yang dapat berupa pinjaman berupa uang dalam jangka pendek. Sedangkan jangka menengah maupun jangka panjang dari lembaga atau pinjaman dari pihak ketiga lainnya.
  - c. Simpanan sukarela berjangka yang berasal dari masyarakat.<sup>10)</sup>

Dari pendapat di atas diperoleh gambaran yang jelas perolehan modal koperasi dari dalam yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Sedangkan dari luar berupa bantuan, hibah atau hadiah, kredit dan simpanan sukarela berjangka dari masyarakat.

---

10) Bulletin Koperasi, *Op.Cit*, halaman 9

Simpanan pokok merupakan yang diharuskan bagi setiap anggota yang masuk dan besarnya sama untuk setiap anggota jumlah minimumnya, sedangkan jumlah maksimumnya tidak dibatasi dan dibayar pada waktu-waktu tertentu. Simpanan sukarela adalah simpanan jumlah dan waktunya tidak ditentukan dengan pasti.

Dari ketiga unsur simpanan dari dalam ini, bila kegiatannya berjalan sesuai dengan keinginan koperasi, koperasi tidak perlu lagi mencari tambahan modal dari pihak lain. Namun saat ini dapat kita lihat bersama modal yang berasal dari simpanan naik turun dengan tidak teratur, sehingga sulit untuk dijadikan modal satu-satunya dalam jangka panjang. Di samping itu kesadaran bagi anggota koperasi akan pentingnya modal bagi kemajuan dan perkembangan koperasi masih belum menjamin.

Pinjaman dari luar sebenarnya jika dapat dilakukan dengan meminjam dari anggota koperasi itu sendiri yang disamakan dengan jika meminjam dari pihak luar. Tetapi berhubung para anggota koperasi sendiri kekurangan finansial maka yang dapat dikembangkan adalah pinjaman dari pihak luar, yaitu bank-bank pemerintah memberikan syarat-syarat yang lebih mudah dan ringan dibandingkan dengan Bank-bank Umum dan Swasta.

Sedangkan dalam buku Koperasi Sebuah Pengantar, Departemen Koperasi membagi perolehan sumber daya atau modal untuk pembiayaan usaha koperasi terdiri :

1. Sumber dana langsung.
  - a. Simpanan anggota, pokok, wajib dan sukarela.
  - b. Kredit yang diperoleh dari Bank Pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Modal pinjaman ini diberi bunga tetapi tingkat bunganya harus sesuai dengan tingkat bunga modal pada umumnya. Disamping itu harus memenuhi beberapa syarat :
    1. Character :  
Sifat pribadi anggota pengurus yang menanggung utang.
    2. Capital :  
Kekayaan koperasi, syarat ini biasanya sulit dipenuhi koperasi.
    3. Coleteral :  
Jaminan atau kredit yang diberikan oleh Bank. Syarat inipun sukat dipenuhi. Untuk memenuhi perlu mendapat bantuan lembaga-lembaga resmi misalnya Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (PPKK), sebelum lembaga ini bernama Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK).
    4. Capacity :  
Adalah repayment capacity artinya kemampuan untuk membayar kembali kredit yang diterima. Ukurannya adalah kemungkinan berhasilnya usaha yang akan dibiayai dengan kredit itu.
    5. Condition atau economic condition :  
merupakan hal yang sukar sekali diperlihatkan, karena kesulitan dalam memperhitungkan perubahan harga yang akan terjadi dalam masyarakat. Perubahan-perubahan harga merupakan salah satu ketidak pastian yang sukar diramalkan.

c. Sisa hasil usaha (laba) yang masih ada dalam koperasi ini menjadi hak para anggota.

2. Sumber dana yang tidak langsung

a. Merupakan penundaan pembayaran barang-barang yang diserahkan oleh anggota koperasi, seharusnya anggota menerima uang langsung pada waktu yang telah ditentukan, akan tetapi karena anggota yang bersangkutan mau menerima penundaan pembayaran, maka koperasi membayarnya setelah barang-barang laku terjual.

b. Kerja sama dari pihak luar dengan ketentuan pihak luar menyediakan dana (modal) sedangkan koperasi menyediakan fasilitas pemasaran. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian.

c. Pendayagunaan penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap yang dipakai mengalami kelusuhan. Agar dapat menggantikan tepat pada waktunya harus disediakan dana penyusutan, sekian persen dari harga beli yang dilakukan setiap tahun. Sebelum habis masa susutnya/ sebelum aktiva tetap yang bersangkutan harus diganti yang baru, maka dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat permodalan.<sup>11)</sup>

Koperasi memang tidak mengutamakan modal, akan tetapi koperasi yang pembayarannya kurang sehat, akan bekerja kurang lancar. Sebaliknya koperasi yang bekerja dengan pembiayaan dan pembelanjaan yang sehat akan mendapatkan dukungan (backing) dan simpati dari para pengusaha setempat dan mendapat kepercayaan dari pihak Bank.

---

11) Anonim, Koperasi Sebuah Pengantar, Departemen Koperasi Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi, Jakarta 1983, halaman 256 - 259.

Disamping itu pula dijelaskan bahwa di dalam memilih sumber dana, koperasi harus memperhatikan segi biaya maupun kemampuan pengembaliannya, yakni :

1. Return :  
Kemungkinan berhasilnya usaha dan dapat mengembalikan kredit dengan bunganya.
2. Repayment Capacity :  
Kemampuan koperasi untuk mengembalikan kredit dan bunganya dari pendapatan koperasi yang diperoleh dari usaha lain.
3. Risk Bearing Ability :  
Kemampuan koperasi untuk mengembalikan kredit dengan bunganya, dengan kekayaan koperasi itu sendiri, atau bagi koperasi yang tanggungannya tidak terbatas, termasuk pula kekayaan anggota.<sup>12)</sup>

Ketiga macam faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih sumber dana untuk pengembalian kredit tersebut merupakan pembatasan bagi koperasi untuk tidak sembarangan mengambil kredit. Disamping itu koperasi perlu juga mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini :

1. Likuiditas perusahaan, yakni kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban yang telah sampai pada waktunya.
2. Solvabilitas, yaitu kemampuan koperasi untuk membayar utangnya dari aktiva yang dimiliki.
3. Rentabilitas, yaitu kemampuan koperasi untuk mencapai keuntungan.<sup>13)</sup>

---

12) I b i d.

13) I b i d., halaman 260

Dimana pembelanjaan yang kurang sehat menyebabkan timbulnya kecurigaan dikalangan anggota dan lemahnya organisasi koperasi.

Agar koperasi tumbuh dan berkembang serta mendapatkan kepercayaan dari para anggota, dari Bank dan dari pengusaha-pengusaha setempat diperlukan pengelolaan (managemen), administrasi keuangan yang rapi serta adanya pembelanjaan yang sehat pula.

## 2. Perkembangan Volume Usaha Koperasi

Dalam pembahasan ini penulis tidak menjelaskan prosedur perkoperasian secara rinci, namun lebih menekankan kepada hal yang sifatnya lebih dominan dalam mendukung perkembangan koperasi dalam usaha meningkatkan volume usahanya. Seperti halnya segi kepengurusan dan anggota, manajemen koperasi serta peranan pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui bersama koperasi sebagai alat perekonomian yang bukan merupakan perkumpulan modal melainkan perkumpulan orang-orang yang mempunyai semangat dan kepentingan yang sama yaitu berusaha secara penuh semangat kegotong royongan untuk memperbaiki tarap hidup, untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya relatif lemah.

Dengan sendirinya koperasi mempunyai cara-cara bekerja yang khas agar tidak menghindari hakikinya, dengan kata lain koperasi harus dapat mempertahankan diri

dan mengusahakan perkembangannya ditengah-tengah usaha perekonomian lainnya. Dimana lebih memperhatikan peningkatan usaha-usaha koperasi sebesar mungkin sehingga kedua fungsinya sebagai alat perekonomian dan alat kemasyarakatan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Seperti halnya dikatakan oleh G. Kartasapoetra dan kawan-kawan, dalam koperasi terdapat dua unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Anggota sebagai para pelaku dalam koperasi dengan memperhatikan kedudukan anggota dalam koperasi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap koperasi pada tingkat pertama harus dapat mengusahakan agar setiap anggota selalu tertarik atau selalu mempunyai gairah terhadap koperasinya, koperasi harus mewujudkan suatu iklim yang dapat membangkitkan perasaan para anggotanya bahwa koperasi adalah miliknya yang harus dipelihara, dibina, dipupuk, dikembangkan dan dipertahankan agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya.
- b. Usaha sebagai sisa pemberi bentuk koperasi. Usaha koperasi merupakan usaha dibidang perekonomian, yang sudah tentu akan bergerak ke luar lingkungan perkumpulan, sebab untuk mencapai tujuannya itu, meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, koperasi disamping harus memiliki modal dan sarana-sarana pendukung operasionalnya, juga harus mengadakan hubungan-hubungan dengan pihak ketiga, sehingga diperoleh masukan-masukan guna mencapai tujuan itu serta pendapatan-pendapatan sebagai hasil usaha.<sup>14)</sup>

---

14) G. Kartasapoetra dkk, *Op.Cit*, halaman 145.

Menyimak dari pendapat tersebut diatas, antara koperasi dengan para anggotanya terdapat pengaruh timbal balik pada hal-hal yang bersifat positif, maka diperlukan adanya suatu program kerja yang dinamis, artinya pengurus koperasi harus dapat lahir dari rapat anggota yang mencerminkan kedemokrasian.

Program kerja yang demikian akan dijalankan oleh para anggota dengan penuh kesukaan hati, penuh kegairahan, sehingga sasaran-sasarannya dapat tercapai dengan baik. Karena anggota koperasi merasa terpanggil untuk melaksanakan penuh tanggung jawab, karena mereka turut membentuk program kerja tersebut. Disamping itu mereka sadar, jika mengabaikan atau menjalankannya tidak dengan sepenuh hati, berarti mengingkari kebijaksanaannya sendiri, pandai berusul tetapi tidak pandai melaksanakan.

Dalam segi usaha koperasi akan bergerak dan tunduk kepada hukum-hukum perekonomian yang berlaku, hubungan dengan alat-alat pertanian lainnya berlaku secara wajar sebagai suatu usaha yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan untuk usaha-usaha selanjutnya dan juga pembinaan kepada para pengelola usaha ini harus dilakukan secara berimbang.

---

14) G. Kartasapoetra dkk, Op. Cit halaman 145

Lebih lanjut beliau di negara kita orang mau mendaftarkan menjadi anggota koperasi setelah adanya dorongan atau anjuran-anjuran dan terjadi karena :

- a. Tertarik oleh jasa-jasa koperasi yang bakal dinikmatinya (keuntungan-keuntungan material dan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkannya dengan mudah dan cepat).
- b. Sikap ikut-ikutan sebagai simpati ke dalam lingkungan atau instansi yang telah mendirikan koperasi.<sup>15)</sup>

Anggapan-anggapan yang demikian ini perlu dihilangkan dengan jalan memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat secara berkesinambungan. Karena apabila dibiarkan perkoperasian tidak akan maju dan berkembang, dimana anggota berperinsip bahwa tugas mereka telah cukup apabila segala iuran yang diwajibkan telah dapat dilunasi secara tepat atau teratur dan selanjutnya mereka pasif. Urusan pengembangan dan kemajuan koperasi merupakan urusan pengurus.

Dalam usaha pengembangan perkoperasian, dijelaskan oleh G. Kartasapoetra dan kawan-kawan :

Masih sangat perlu ditingkatkan penerangan-penerangan, penyuluhan-penyuluhan berkoperasi tersebut adalah timbul sendiri dari pihak penduduk menurut pengamatan lebih lanjut ternyata kebanyakan penduduk di pedesaan selalu bersifat "wait and see" jika koperasi yang

---

15) *I b i d*, halaman 148  
berdiri lebih berhasil memberikan kemanfaatan

kepada penduduk, barulah penduduk lainnya mendaftarkan diri sebagai anggota.<sup>16)</sup>

Sehubungan dengan pendapat di atas, bahwa koperasi terlebih dahulu mampu menunjukkan jasa-jasanya, untuk itu pengurus koperasi harus benar-benar mengetahui tentang seluk-beluk usaha serta berjiwa usaha yang tebal, tahan terhadap segala macam tantangan yang mungkin timbul. Keberhasilan koperasi yang dominan yaitu melahirkan kepercayaan dan kepercayaan ini merupakan modal yang menentukan.

Untuk menghindari timbulnya masalah maka setelah koperasi berhasil menjalankan usahanya, pengurus perlu melakukan pemupukan terhadap para anggotanya, agar mereka benar-benar merasakan sebagai pemilik koperasi yang bertanggung jawab ikut mempertahankan dan memajukannya.

Usaha-usaha pendekatan terhadap adalah yang paling baik, misalnya dengan cara melakukan kunjungan kerumah anggota, selain rasa kekeluargaan dapat dipupuk lebih erat, pembicaraanpun lebih terbuka. Pengurus akan mengetahui lebih jelas akan rumah tangga anggota serta secara umum dapat mengetahui tentang jasa-jasa yang sangat diperlukan para anggotanya dengan keluarganya. Hasilnya dapat bermanfaat bagi para pengurus untuk membuat program kerja koperasi yang lebih terarah.

---

16) I b i d, halaman 151.

Hubungan-hubungan yang baik antara pengurus dan para anggota perlu dipupuk terus dan anggota juga perlu pembinaan dan pengarahan agar usahanya masing-masing dapat lebih mantap dan lancar, sedangkan bagi pengurus untuk memperoleh masukan menyusun program kerja koperasi juga bila terjadi kemunduran dan kerugian dikarenakan keadaan ekonomi secara umum maka para anggota akan memaklumi dan tidak putus asa, bahkan sebaliknya mereka akan lebih meningkatkan partisipasinya, aktif secara bersama-sama untuk mencari jalan keluar. Dengan demikian ketahanan berkoperasi akan timbul dan dimiliki pengurus maka keberhasilan akan dapat diraih.

Untuk dapat dimengerti dengan jelas, dalam buku pengetahuan perekonomian tugas dan tanggung jawab pengurus meliputi :

- a. Di dalam koperasi, pengurus mewakili dan bertindak hukum dan atas nama koperasi.
- b. Pengurus menyusun program kerja koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- c. Pengurus mengamati agar koperasi bergerak dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi koperasi.
- d. Pengurus mengamati secara teratur keuangan koperasi agar selalu dalam keadaan kokoh dan stabil.
- e. Pengurus berusaha agar dibina antara koperasi dan masyarakat selalu baik dan selalu mendapat dukungan dari para anggotanya.

- f. Pengurus berusaha agar koperasi dapat menghasilkan barang-barang yang bermutu baik dan pelayanan yang baik kepada anggota.
- g. Pengurus secara berkala untuk mengadakan penilaian atas jalannya usaha koperasi yang diarahkan.
- h. Pengurus berusaha menyampaikan kepada para karyawan, anggota dan masyarakat pengerian tentang palsapah azas dan sendi-sendi dasar koperasi.
- i. Pengurus menetapkan dan menyerahkan wewenang dibidang usaha kepada manager guna dapat melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari serta tanggung jawab.

Tugas dan tanggung jawab pengurus koperasi sangat luas dan sangat berat, hal ini memang memerlukan orang yang benar-benar memiliki sifat ulet, tekun dan jujur serta jiwa sosial yang tinggi dalam memikul tanggung jawab tersebut. Peran serta anggota dalam usaha membantu tugas-tugas koperasi sangat diharapkan dalam usaha meningkatkan badan usaha ini supaya dapat bersaing dengan usaha dagang yang lain serta dapat meningkatkan para anggotanya.

Jadi dalam kegiatannya pengurus menjalankan keputusan rapat anggota yang telah dijelaskan di atas. Jadi di dalam kegiatannya pengurus menjalankan keputusan rapat anggota yang telah dijelaskan di atas setiap ke-

---

17) Anonim. Pengetahuan Perekonomian. Departemen Koperasi Direktorat Bina Penyuluhan. 1983. Jakarta. halaman 243.

putusan dapat anggota pengurus harian merencanakan apa yang dikerjakan agar keputusan tersebut dapat dilaksanakan untuk mencapai sasarannya.

Seandainya pengurus telah melaksanakan kegiatan seperti di atas maka pengurus telah menjalankan fungsi pengelolaan atau manajemen koperasi. Manajemen dapat diartikan suatu proses dimana para pelaksana menjalankan tugasnya di dalam mencapai yang telah ditetapkan oleh rapat anggota.

Koperasi sebagai badan usaha yang bergerak di dalam perekonomian mempunyai tataan manajemen yang berbeda dengan badan usaha lainnya, perbedaannya tersebut bersumber dari hakikat manajemen koperasi yaitu dari, oleh dan untuk anggota, yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi. Untuk itu dalam manajemen koperasi dikenal adanya rapat anggota, pengurus, badan pemeriksa, dan manager atau pelaksana utama.

Di dalam manajemen koperasi kekuasaan tertinggi ada ditangan rapat anggota sebab koperasi adalah organisasi dari, oleh dan untuk anggota. Untuk dapat bekerja dengan baik, pengelolaan koperasi tidak mungkin ditangani oleh seluruh anggota, dipilihlah pengurus yang dapat diharapkan untuk menjalankan usaha koperasi agar usahanya dapat berhasil, dimana pengurusnya diserahkan kepada badan pemeriksa. Pengurus maupun badan pemeriksa dipilih oleh anggota yang untuk dan atas nama anggota.

Seperti halnya dikatakan oleh Ir. Endang Sastra. A, dalam manajemen koperasi tataan organisasi di dasarkan pada pembagian wewenang dan tanggung jawab, yaitu :

Karena manajemen koperasi pada dasarnya membicarakan pengelolaan organisasi koperasi, maka untuk mengelola usaha koperasi, rapat anggota mendelegasikan wewenang mengelola tersebut pada pengurus koperasi. Pada koperasi pendelegasian wewenang dari rapat anggota kepada pengurus tersebut dibarengi pula dengan pembenahan tanggung jawab yang seimbang. Disamping itu rapat anggota juga memberi batas tentang pendelegasian wewenangnya kepada pengurus yaitu untuk menjalankan usaha koperasi saja. Pada koperasi yang masih kecil pengusahanya dapat dilaksanakan sendiri oleh pengurus. Sedangkan wewenang untuk memeriksa jalannya usaha, oleh rapat anggota didelegasikan kepada badan pemeriksa.<sup>18)</sup>

Bila pendelegasian wewenang ini diterapkan dalam tataan kehidupan koperasi, maka pekerjaan akan lebih ringan karena usaha sehari-hari sudah ada yang menangani, sedang pengurus lebih memusatkan perhatiannya pada aspek-aspek idealnya. Kegiatan ekonomi sehari-hari dapat diserahkan kepada pegawai yang diberi tanggung jawab tunggal yaitu manager, dimana modal sudah besar dan perkembangan usahanya sudah mencapai beberapa bidang atau macam-macam usaha maka diperlukan pengelolaan yang lebih baik, teliti dan terarah baik manajemen maupun administrasinya.

---

18) Endang Sastra. A, Pembangunan Koperasi Teori dan Kenyataan, Penerbit Alumni Bandung, 1985, halaman 64.

Setiap usaha yang sudah melibatkan sekumpulan orang dalam suatu organisasi akan lebih baik manajemen dan administrasi digunakan untuk menangani segala bentuk kegiatan sehari-harinya. Sebab walaupun modalnya besar dan volume usahanya macam-macam bila pengelolaan atau manajemennya serta administrasinya tidak kelihatan dari segala aspek kegiatan, akan mengarah kepada hal penyalahgunaan wewenang. Hal ini akan timbul masalah baru dan citra koperasi di masyarakat susah untuk menghapuskan dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap citra koperasi dimana koperasi harus bisa menimbulkan kepercayaan baru dalam arti koperasi harus berhasil dalam bidang usahanya. Dalam penanganan dan pengelolaan koperasi supaya dapat bangkit dan berkembang untuk kepentingan rakyat diperlukan suatu sistem manajemen yang baik.

Dijelaskan oleh Endang Sastra A. ada lima fungsi manajemen, yaitu "Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Koordinasi dan Pengawasan".<sup>19)</sup>

Kemudian beliau mengatakan lagi fungsi manager adalah sebagai berikut :

Melaksanakan fungsi management secara utuh dan bulat yang meliputi : Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dimana menggerakkan personal dan staffing yang merupakan inti kegiatan

---

19) I b i d, halaman 65

koordinasi dan pengawasan baik di bidang usaha maupun organisasi pelaksana.<sup>20)</sup>

Jadi manager adalah orang yang bertanggung jawab atas jalannya koperasi sehari-hari. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada tugas yang dibebankan dan wewenang yang dilimpahkan oleh pengurus. Manager juga sebagai perantara antara pegawai disatu pihak dan pengurus dan pihak. Ini berarti aspek organisasi maupun usaha ekonomi merupakan tanggung jawab manager.

Penjelasan dari pada lima fungsi manajemen itu adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang harus dibuat merupakan peranan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dikerjakan, kapan dimulai dan selesainya pekerjaan itu dan siapa yang harus melaksanakannya dan mengerjakannya.
2. Pengorganisasian mengumpulkan berbagai sumber yang ada seperti manusia, uang, barang, pasilitas guna mencapai pekerjaan yang efektif dan efisien.
3. Pengarahan, dalam mengerjakan fungsi pengarahan seorang manager memberikan motivasi agar seluruh personal dapat bergerak, memberikan petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi ataupun pendelegasian wewenang tertentu dapat mengerjakan pekerjaannya.

---

20) I b i d, halaman 72

4. Koordinasi yaitu, menjelaskan seluruh gerak dan usaha koperasi guna mencapai sasaran yang dituju agar semuanya dapat bergerak saling mengisi dan tidak terjadi pertentangan satu dengan yang lainnya yang dapat menghambat program.
5. Dalam sistem manajemen koperasi fungsi pengawasan berada ditangan badan pemeriksa yang bertindak untuk dan atas nama anggota. Oleh sebab itu di dalam keanggotaan, badan pemeriksa yang ada dipilih oleh, untuk dan dari anggota. Fungsi manager dalam menjalankan pengawasan, dilihat dari segi manajemen koperasi merupakan pengawasan operasional.

Untuk proses tindak lanjut, kalau memang memungkinkan dalam mengatasi secara tepat persoalan organisasi dan manajemen organisasi menerapkan sistem pencangkakan manajemen. Dengan strategi ini diharapkan terdapat terjadi perubahan kondisi dalam koperasi dalam cara memasukkan unsur-unsur teknologi baru yang dibawa oleh tenaga dari luar koperasi yang telah sudah siap dipakai.

Tenaga tersebut memenuhi proses pembinaan yang singkat yang diharapkan dapat menjadi manager profesional dan memiliki idialisme dan keterampilan usaha yang dapat menjaga keseimbangan dan kesetabilan usaha koperasi.

Koperasi menjadi wadah utama kegiatan ekonomi baik di desa maupun di kota yang efektif dan efisien. Ini berarti, bahwa untuk mencapai sasaran tertentu diperlukan suatu proses transformasi yang kompleks atas sejumlah input yang sangat besar nilainya.

Koperasi dalam perkembangannya terpaksa harus hidup dalam kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan yaitu harus dapat bersaing dengan kekuatan ekonomi yang lain sangat kuat dan mapan, dimana telah mempunyai peranan dan kedudukan sangat kuat dalam kehidupan ekonomi nasional diantaranya melalui jaringan-jaringan pemasaran yang sangat luas di seluruh Indonesia.

Untuk dapat menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah meletakkan strategi perlindungan, dimana strategi disebut dimaksudkan sebagai usaha sementara yang dalam jangka panjang diharapkan agar kekuatan dan kemampuan koperasi itu sendiri tidak dapat menghadapi lingkungan dan kondisi persaingan tersebut.

Oleh karena itu maka langkah yang perlu diambil koperasi adalah menyusun dan mengembangkan suatu jaringan ekonomi secara nasional, yang dapat dimiliki, diatur dan dimanfaatkan untuk kepentingan koperasi dan jaringan tersebut dapat meningkatkan tawar menawar mereka dengan jalan mengintegrasikan kegiatan usaha koperasi ke dalam suatu sistem ekonomi pedesaan.

Dimana G. Kartasapoetra dan kawan-kawan, menjelaskan pengintegrasian koperasi itu terbagi dua macam :

1. Integrasi Horizontal : Penggabungan koperasi-koperasi yang sejenis dan setingkat dalam tingkatan yang lebih tinggi jadi dalam hal ini primer, pusat gabungan-gabungan induk koperasi. Dengan penggabungan yang demikian dimaksudkan supaya terjadi volume usaha yang sangat besar atau lebih besar, sehingga tidak saja dapat bekerja lebih berhasil atau lebih memberikan manfaat (pengurangan pengongkosan mengadakan pengolahan-pengolahan dan lain sebagainya).
2. Integrasi Vertikal : Penggabungan berlaku pada sejenis koperasi dari primer ke induk sebagai suatu unit usaha yang tak dapat dipisah-pisahkan maka dapat jelas bahwa dalam integritas vertikal ini unit harus mempunyai rencana kerja yang integritas (meliputi keseluruhan), sehingga kegiatan-kegiatannya sejak dari primer ke induk dan sebaliknya, merupakan kegiatan usaha yang sambung menyambung. Kegiatan usaha-usahanya dibagi-bagikan dan diserahkan pada tingkatan yang cocok untuk itu, hal ini tergantung dari jenis koperasi-koperasi yang bersangkutan dan kondisi-kondisi setempat yang dalam penugasan-penugasan itu dapat diadakan variasi dan modifikasi.<sup>21)</sup>

Dalam hal ini proses pengintegrasian koperasi secara vertikal dan horizontal harus dilihat dalam makna yang lebih dalam dan luas dari pada sekedar integrasi dari aspek ekonomis. Pengintegrasian itu merupakan akumulasi dari proses kegiatan usaha yang terus dapat berkembang dibawah suatu pusat pengendalian yang dimiliki oleh

---

21) G. Kartasapoetra dkk, *Op.Cit.*, halaman 168

koperasi sendiri. Dengan demikian "*cooperative Effect*" akan dapat dilaksanakan melalui perbaikan prestasi koperasi dalam bentuk lebih mampunya koperasi untuk menyediakan berbagai sumber dan jasa produksi bagi anggotanya.

Secara kenyataan koperasi (sesuai dengan jenisnya) mempunyai kemampuan untuk menangani tugas-tugas perekonomian bagi kepentingan masyarakat, dengan mengutamakan "*Secvice Underking*" dan bukan "*Profil Undertaking*". Adanya pemusatan-pemusatan koperasi memungkinkan koperasi melakukan usaha yang lebih besar karena koperasi dapat menghimpun modal yang lebih besar. Usaha yang dilakukannya terintegrasi sehingga segala sesuatu sejalan dari primer hingga induk yang tidak memungkinkan adanya kompetisi-kompetisi yang sebagaimana coraknya.

Dalam mengusahakan perkembangan koperasi, pemerintah selalu memberikan perhatian secara khusus karena koperasi dipandang sebagai soko guru perekonomian nasional.

Mendorong perkembangan koperasi yang dilakukan pemerintah tidak berarti pemerintah campur tangan dalam urusan intern koperasi, kebebasan gerak koperasi tetap terjamin sesuai dengan demokrasi ekonomi, pelaksanaan dan pembinaan kehidupan koperasi untuk meningkatkan kehidupan

rakyat masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan (modal tenaga terdidik, pemasaran) maka pemerintah memberikan dorongan dan bantuan-bantuan.

Seperti halnya dijelaskan Undang-undang perekonomian pasal 37 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967, yang dikutip oleh G. Kartasapoetra dan kawan-kawan, menyatakan :

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi serta kemampuannya untuk melaksanakan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 terutama ayat satu (1).<sup>22)</sup>

Suatu proses pembinaan yang terus menerus dari berbagai pihak sangat diperlukan oleh koperasi, yang tujuannya agar koperasi bertambah maju dan berhasil.

Materi pembinaan yang diutamakan adalah pemecahan masalah yang segera dan harus dihadapi dan dicari alternatif jalan keluarnya. Materi lain yang tak kalah pentingnya adalah pengetahuan dan keterampilan organisasi manajemen usaha, administrasi dan pembukuan serta pengetahuan-pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkembangan koperasi.

Endang Sastra.A membagi secara pembinaan dan sasaran pembinaan yaitu :

- Pendidikan formal seperti kursus, latihan, khususnya bagi fungsionaris koperasi.
- Pendidikan non formal dengan banyak cara seperti diskusi ceramah anjangsono, karya wisata.

---

22) I b i d, halaman 174.

Sasaran pembinaan yang diperlukan :

- Data atau keterangan pertumbuhan dan perkembangan koperasi termasuk persoalan-persoalannya yang senantiasa segar dan berlanjut.
- Satuan tindak dan motivasi dari instansi yang membangun masyarakat.<sup>23)</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1967, tentang pokok-pokok perkoperasian, pembinaan koperasi dibagi tiga tahap yang dapat dilaksanakan secara serentak, yang dikutip oleh Irma Suwandi, yaitu :

1. Ing Ngarso asung tulodo : artinya yang didepan memberikan contoh nyata yang layak ditiru atau dilaksanakan oleh koperasi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan bimbingan langsung kepada organisasi baik berupa bantuan usaha, manajemen maupun bantuan permodalan. Selain itu membuka kesempatan usaha bagi koperasi yang langsung mendapat bimbingan dari pemerintah.
2. Ing madyo mangun karso : artinya yang ditengah memberikan dorongan atau motivasi. Bentuk kebijakan vase kedua ini untuk menumbuhkan kekuatan dan kemampuan koperasi melalui latihan penataran, pengembangan usaha dengan menciptakan jaminan pasar, kepastian harga, perluasan peran serta anggota dan sebagainya. Peran pemerintah akan berkurang dalam membina koperasi apabila usaha koperasi telah berkembang sehingga mampu berswakarya.
3. Tut wuri handayani : artinya mengikut dari belakang dengan memberikan kekuatan. Wujud kebijakan ini pemerintah mengarahkan koperasi agar tumbuh menjadi organisasi ekonomi masyarakat yang mampu bekerja sama

---

23) Ekonomi Sastra., *Op.Cit.*, halaman 119

dan mampu pula bersaing dengan berbagai bentuk usaha lain atau dapat berdiri dengan kekuatan sendiri.<sup>24)</sup>

Ketiga tahap itu merupakan falsafah pembinaan koperasi sebagai satu kesatuan yang utuh, oleh karena itu pelaksanaannya juga dapat dilakukan serentak apabila dilihat secara makro atau keseluruhan. Sebaliknya apabila melihat koperasi secara mikro, pembinaannya dapat dilakukan tahap demi tahap.

Apabila suatu kebijaksanaan pembinaan koperasi berhasil atau tidak dapat dievaluasi dari perkembangan koperasi selama periode pembinaan, beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai perkembangan koperasi, antara lain perkembangan jumlah anggota, perkembangan jumlah organisasi koperasi, perkembangan volume usaha.

Perkembangan usaha, perkembangan modal dan perkembangan kegiatan koperasi relatif dinamis dan tidak mengenal batas. Meskipun secara teoritis jumlah anggota dapat terbatas karena proses kelahiran dan kematian terjadi terus maka penambahan jumlah anggota tidak akan berhenti.

## B. Hipotesis

Diduga bahwa modal dan perkembangan modal volume usaha koperasi di Kotamadya Samarinda mempunyai peranan untuk meningkatkan volume usaha koperasi.

---

<sup>24)</sup> Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Op.Cit.*, halaman 152

### C. Definisi Konsepsional

Sesuai dengan ruang lingkup penulisan yang menguraikan tentang pengaruh modal terhadap volume usaha koperasi di Kotamadya Samarinda maka penulis akan memberikan arti secara konsepsional.

Menangani permodalan koperasi ditegaskan agar rakyat suka mengumpulkan modal nasional yang kuat, dengan tidak mengubah inti azas koperasi bahwa koperasi adalah kumpulan orang-orang bukan kumpulan uang.

Modal dalam koperasi dapat mempunyai arti yang beragam, tetapi secara umum pengertian modal adalah sebagai berikut :

Modal adalah uang atau barang sebagai masukan yang bersama-sama masukan lain seperti alam, tenaga kerja untuk menghasilkan output (produk yang diinginkan) baik yang berupa barang maupun jasa).<sup>25)</sup>

Kemudian lebih lanjut, modal yang dimaksud disini adalah modal koperasi yang terdiri atas :

- a. Simpanan-simpanan yaitu baik yang berasal dari anggota koperasi maupun yang bukan anggota. Simpanan anggota koperasi tersebut terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Adapun simpanan sukarela ada yang diterima dari bukan anggota.
- b. Cadangan, yang dimaksud disini adalah dana yang dipergunakan sebagai cadangan modal untuk memupuk modal koperasi itu sendiri

---

<sup>25)</sup> Bulletin Koperasi, *Op.Cit*, halaman 9

atau dengan kata lain untuk menambah modal koperasi.

- c. Dana-dana yang diartikan disini adalah dana yang diperoleh dari hasil usaha koperasi.
- d. Sisa hasil usaha koperasi adalah keuangan yang diperoleh koperasi yang dapat dijadikan sebagai tambahan modal koperasi tersebut.<sup>26)</sup>

Sedangkan faktor yang mendukung dalam pembahasan perkembangan volume usaha koperasi, penulis membahas pada kepengurusan, manajemen dan pemerintah.

Kemudian dari ketiga faktor tersebut dapat diberikan pengertian sebagai berikut :

- a. Pengurus adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk menyusun dan merumuskan rencana mengadakan perjanjian, penyediaan bahan-bahan, fasilitas dan juga bertanggung jawab terhadap keuangan dan sumber daya manusia untuk kelancaran usaha koperasi.
- b. Manajemen adalah suatu seni untuk merencanakan, mengorganisasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- c. Peranan pemerintah merupakan suatu peran serta dalam usaha mendorong, membina, membimbing, memberikan perlindungan, pengawasan dan memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan-kemudahan untuk perkembangan usahanya lebih mapan.

---

26) Harsoyono Subakto dan Bambang Tri Cahyono, Ekonomi Koperasi

### BAB III

#### METODE PENDEKATAN

##### A. Definisi Operasional

Di dalam penulisan ini selanjutnya akan diberikan suatu definisi operasional yang berhubungan dengan obyek yang diteliti sebagai indikator yang digunakan adalah variabel-variabel antara lain :

Variabel independent atau variabel bebas adalah modal yang digunakan oleh suatu koperasi untuk meningkatkan perkembangan volume usahanya.

Sedangkan variabel dependent atau variabel terikat adalah perkembangan volume usaha itu sendiri yang sangat tergantung dengan besar kecilnya modal yang digunakan.

Kemudian lebih lanjut pengertian dari pada kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Modal koperasi adalah suatu pendapatan yang diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari sisa hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lainnya untuk pembiayaan bidang-bidang usaha yang dilakukan.
2. Perkembangan volume usaha koperasi, yang dimaksud dalam penulisan ini adalah besar kecilnya hasil dari usaha koperasi yang diperoleh dari modal

koperasi pertahun, sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 yang dinilai dengan rupiah.

## **B. Perincian Data Yang Diperlukan**

Selanjutnya untuk menganalisa tentang apa yang menjadi tujuan dari pada skripsi ini, maka diperlukan data-data yang dianggap relevan dengan penulisan, adapun data yang diperlukan meliputi :

1. Data volume usaha koperasi dari tahun 1993 - 1997 (selama 5 tahun) di Kotamadya Samarinda.
2. Data modal koperasi di Kotamadya Samarinda dari tahun 1993 - 1997.
3. Data keadaan koperasi Kotamadya Samarinda dari tahun 1993 - 1997 mengenai :
  - jenis-jenis koperasi.
  - usaha yang dijalankan oleh koperasi
  - bagan atau struktur managemen koperasi
  - jumlah anggota koperasi.
  - data-data lain yang menunjang.

## **C. Jangkauan Penelitian**

Sebagai obyek penelitian dalam penulisan ini adalah Kotamadya Samarinda dan terbatas pada variabel dependent yaitu volume usaha koperasi dengan variabel independent saja yaitu modal koperasi sejak tahun 1993 sampai dengan 1997.

#### **D. Jangkauan Pengumpulan Data**

Sistem pengumpulan data yang dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut :

1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui teknik observasi kepustakaan, laporan-laporan dari jawatan atau instansi yang hubungannya dengan penulisan ini.
2. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui reset ke lapangan yang langsung kepada pengurus-pengurus koperasi dengan teknik tanya jawab untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang erat kaitannya dengan permasalahan di atas.

#### **E. Analisa Dan Pengujian Hipotesis**

Salah satu tujuan analisis data ialah untuk memperkirakan atau memperhitungkan besarnya pengaruh serta kuantitatif dari perubahan suatu kejadian lainnya.

Untuk keperluan evaluasi atau penilaian maka dipergunakan dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y, selain itu juga kedua variabel ini dapat dipergunakan untuk analisis suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Apabila kedua variabel X dan Y ada hubungan (korelasi) maka perubahan nilai variabel yang satu akan mempengaruhi nilai variabel lainnya.

Untuk memudahkan analisis maka terlebih dahulu kita menentukan variabel dependent dan variabel independent. Adapun yang menjadi variabel dependent (Y) adalah volume usaha koperasi dan variabel independent (X) adalah modal koperasi.

Kemudian jika perkembangan volume usaha koperasi tersebut kita diberi simbol ( $y$ ) karena merupakan variabel bebas, sehingga fungsinya menjadi :

$$Y = f (X)$$

Selanjutnya untuk menganalisa hubungan antara volume usaha koperasi dengan besar/kecilnya modal, maka dalam penulisan ini hubungan tersebut dapat dianalisa dengan mempergunakan formulasi analisis regresi atau fungsi linear sebagai berikut :

$$y = a + bx$$

dimana :

$y$  = volume usaha koperasi

$x$  = modal koperasi

$a$  = konstanta

$b$  = koefisien regresi, yang menunjukkan perubahan volume usaha koperasi yang diakibatkan adanya perubahan jumlah modal yang digunakan.

Untuk menghitung besarnya nilai  $a$  dan  $b$ , maka dapat menggunakan peralatan ekonometrika sebagai berikut :

$$\Sigma y = na + b \Sigma x$$

$$\Sigma xy = a \Sigma x + b \Sigma x^2$$

Apabila persamaan ini diselesaikan dengan menggunakan rumus Cramer maka dapat diperoleh :

$$a = \frac{\begin{vmatrix} \Sigma Y & \Sigma \\ \Sigma xy & \Sigma x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} n & \Sigma y \\ \Sigma x & \Sigma x^2 \end{vmatrix}} = \frac{228 y \Sigma x^2 - \Sigma xy \Sigma x}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$b = \frac{\begin{vmatrix} n & \Sigma y \\ \Sigma x & \Sigma xy \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} n & \Sigma x \\ \Sigma x & \Sigma x^2 \end{vmatrix}} = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

Selanjutnya untuk mengetahui kebenaran atau keberartian dari analisa ini, digunakan uji tes dengan tingkat keyakinan (LOC) = 95 %, rumusnya sebagai berikut :

$$t = \frac{(b - b_0) \sqrt{x^2}}{T_u} \dots\dots\dots 27)$$

dimana :

$$T_u = \frac{\Sigma (y - \hat{y})^2}{n - 2} \dots\dots\dots 28)$$

Dengan digunakan tingkat keyakinan (LOC) = 95 %, apabila test hitung lebih besar dari test daftar maka :

$H_0$  : B i = o ditolak

$H_1$  : B i = o diterima

---

27) J. Suprpto, *Ekonometrik*, Edisi satu, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, halaman 133.

28) *I b i d*, halaman 85

Dengan demikian untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel  $x$  dan  $y$ , maka perlu ditentukan koefisien korelasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x) (\sum y)}{[n \sum x^2 - (\sum x)^2] [n \sum y^2 - (\sum y)^2]} \dots 29)$$

Untuk mengetahui kebenaran dari koefisien korelasi tersebut perlu ditest dengan menggunakan uji test sebagai berikut :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{1 - r^2} \dots \dots \dots 30)$$

Dengan tingkat keyakinan (LOC) = 95 %, apabila test hitung lebih besar dari pada test daftar, maka dapat dikatakan :

$H_0$  :  $B_i = 0$  ditolak

$H_1$  :  $B_i = 0$  diterima

---

29) Sudjana, Metode Statistik, Edisi IV, Tarsito Bandung, 1986, halaman 354.

30) I b i d, halaman 365.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. Tinjauan Umum Daerah TK II Kotamadya Samarinda**

**1. Letak Geografis**

Kotamadya Samarinda terletak dalam wilayah Kalimantan Timur yang memanjang dari kiri kanan Sungai Mahakam dan melebar ke daratan kurang lebih 10 KM. Sungai paling lebar kurang lebih  $\pm$  16 Km yang secara geografis terletak pada koordinat  $0^{\circ} 20, 16$  lintang selatan  $116^{\circ} 15'37 - 117^{\circ} 24 17$  bujur timur.

Adapun wilayah batas wilayah Kotamadya Samarinda menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Th. 1987 adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Badau dan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sangsanga Kabupaten Kutai.

**2. Luas Wilayah Dan Pembagian Daerah Kerja**

Wilayah Kotamadya Samarinda memiliki luas 783 Km<sup>2</sup> (PP 21/87) terperinci sebagai berikut :

Tabel 1

Nomor	K e c a m a t a n	Luas Wilayah
1.	Samarinda Hilir	198,22 Km <sup>2</sup>
2.	Samarinda Hulu	177,63 Km <sup>2</sup>
3.	Samarinda Seberang	74,33 Km <sup>2</sup>
4.	Palaran	332,82 Km <sup>2</sup>

Sumber data : BAPPEDA TK. II SAMARINDA

### 3. Pembagian Wilayah Administrasi Kelurahan

Tabel 2

No	Kecamatan	Nama Kelurahan Desa	Ket.
1.	Samarinda Ilir	1. K. Karang Mumus 2. K. Selili 3. K. Sei Dama 4. K. Sidomulyo 5. K. Pelabuhan 6. K. Pasar Pagi 7. K. Sei Pinang Dlm 8. K. Sempaja 9. K. Sei Pinang Luar 10. K. D. Lempake 11. K. D. Pulau Atas 12. K. Sambutan	
2.	Samarinda Hulu	1. K. Air Putih 2. K. Karang Asam	

No	Kecamatan	Nama Kelurahan Desa	Ket.
		3. K. T. Lerong Hulu 4. K. T. Lerong Hilir 5. K. Jawa 6. K. Sidodadi 7. K. Bugis 8. K. D. Lok Bahu 9. K. D. Buah 10. K. D. Loa Buah	
3.	Samarinda Seberang	1. K. Baka Rapak Dlm 2. K. Sei Keledang 3. K. Mesjid 4. K. Loa Janan Hilir	
4.	P a l a r a n	1. K. Rawa Makmur 2. K.K. Bukuan 3. K. Handil Bhakti 4. K. D. Simp. Pasir 5. D. Bantuas	

Sumber Data : BAPPEDA TK II SAMARINDA

## B. Keadaan Dan Perkembangan Koperasi Di Kotamadya

### Samarinda

Keadaan perkoperasian di Kotamadya Samarinda sampai pada bulan Desember 1997 (triwulan IV) adalah cukup berimbang dengan pesat, hal terutama disebabkan oleh

tumbuh kembangnya kesadaran masyarakat Kotamadya Samarinda akan arti pentingnya koperasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum maupun bagi anggota koperasi, selain itu juga dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan juga mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan koperasi.

Secara umum, jenis koperasi yang ada di Kotamadya Samarinda, meliputi koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi NON KUD, dalam perkembangannya koperasi NON KUD tumbuh dengan jumlah yang sangat besar, hal ini dapat terjadi mengingat adanya pengertian dan pengetahuan akan koperasi yang mampu membantu kesejahteraan anggota, sehingga hampir di setiap sektor ekonomi dan setiap aktivitas kemasyarakatan selalu terdapat koperasi masyarakat, keadaan ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 Jenis dan Jumlah Koperasi  
KUD dan NON KUD DI Kotamadya Samarinda  
Tahun 1997

No	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi (Unit)
I.	Koperasi Unit Desa	23
II.	<u>Koperasi NON KUD</u>	
	1. Koperasi Pegawai Negeri	113
	2. Koperasi Karyawan	48
	3. Koperasi ABRI	7
	4. Koperasi Jasa/Simpan Pinjam	8

No	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi (Unit)
	5. Koperasi KSU	19
	6. Koperasi Industri	12
	7. Koperasi Pasar	3
	8. Koperasi Perikanan	3
	9. Koperasi Perternakan	2
	10. Koperasi Angkutan Air/Darat	4
	11. Koperasi Wanita	10
	12. Koperasi Pemuda/Mahasiswa	4
	13. Koperasi Sekolah	36
	14. Koperasi Lain-lain	4

Sumber Data : Kantor Koperasi Kotamadya Samarinda.

Dari data tersebut, terlihat sampai pada triwulan IV tahun 1997 jumlah Koperasi Unit Desa adalah sebanyak 23 Unit dari jumlah Koperasi NON Unit Desa adalah sebanyak 273 Unit dengan jenis usaha yang meliputi distribusikan, jasa/perdagangan dan perkreditan.

Dalam perkembangan selanjutnya tidak semua koperasi tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, adanya aktivitas koperasi yang berupa RAT (rapat anggota tahunan) yang merupakan salah satu Indikator kembangnya koperasi dapat memberikan perkembangan koperasi Riil di Kotamadya Samarinda, hal ini terlihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4 : PELAKSANAAN RAT KOPERASI UNIT DESA &amp; KOPERASI NON KUD TAHUN 1997

NO	JENIS KOPERASI	JUMLAH KOPERASI	YANG SEHARUSNYA RAT	YANG SUDAH RAT	PROSENTASE (%)	KETERANGAN
1	KOPERASI UNIT DESA	23	23	13	50	
2	KOPERASI PEGAWAI NEGERI	113	101	41	20	
3	KOPERASI KARYAWAN	48	43	8	16	
4	KOPERASI ABRI	7	7	4	57	
5	KOPERASI JASA/SIMPAN PINJAM	8	8	-	-	
6	K.S.U	19	19	5	38	
7	KOPERASI INDUSTRI	12	12	-	-	
8	KOPERASI PASAR	3	3	2	66	
9	KOPERASI PERIKAMAN	3	3	-	-	
10	KOPERASI PERTERNAKAN	2	2	-	-	
11	KOPERASI ANGKUTAN AIR/DARAT	4	4	2	50	
12	KOPERASI WANITA	10	10	3	30	
13	KOPERASI PENSIUNAN	4	3	2	33	
14	KOPERASI PEMUDA/MAHASISWA	4	4	1	25	
15	KOPERASI SEKOLAH	36	-	-	-	
16	KOPERASI LAIN-LAIN	4	4	1	25	
JUMLAH		300	246	82		

SUMBER DATA : KANDEKOP TK II SAMARINDA

Dengan demikian maka terlihat masih adanya koperasi di Kotamadya Samarinda yang masih belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dengan presentase yang cukup besar yaitu antara 16 % - 66 %.

Namun demikian ada kecenderungan perkembangan koperasi di Kotamadya Samarinda semakin bertambah, hal ini terlihat pada permohonan proses Badan Hukum Koperasi sampai pada triwulan IV tahun 1997, yang terlihat pada penjelasan tabel berikut ini :

TABEL 5 : PERMOHONAN KOPERASI DALAM BADAN HUKUM KOPERASI TAHUN 1997

NO	NAMA KOPERASI	PROSES KANDEP	PROSES KANWIL	DIKEMBALIKAN
I	<u>KOPERASI PEGAWAI NEGERI</u> 1. KPN. Catera (SMPs Samarinda) 2. KPN. Berigin (Dipenda) TK. II 3. KPN. Bumi Bhakti (Kantor Pertahanan) 4. KPN. Bina Bersama (SMP N. 12) 5. KPN. Sama Mesra (DPU Tk I Kaltim) 6. KPN. Bimada 7. KPN. Balai Industri	- X X - - X X		X - - - - - -
II	<u>KOPERASI KARYAWAN</u> 1. Kopkar Meranti	-	X	-
III	<u>KOPERASI LAIN-LAIN</u> 1. Melati (PKK Palaran) 2. Mega Harapan 3. Untung Batuah (Panti) 4. Bandar Segara (Syahbandar) 5. Poliagro (Poltek) 6. Fakultas Kehutanan 7. Migas 8. Tunas Kelapa 9. Kopas Kemuning 10. KSU. Kesuma Kencana	- - X X X X X X X X X	X X - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -

SUMBER DATA : KANDEPKOP TK II SAMARINDA

Dari tabel tersebut terlihat Kantor Koperasi Pegawai Negeri bertambah menjadi 7 unit, koperasi karyawan 1 unit, dan koperasi lain-lain 10 unit.

Untuk mengevaluasikan perkembangan dan aktivitas koperasi tersebut baik yang sudah berjalan dengan baik maupun koperasi yang baru mulai tumbuh, pihak Departemen Koperasi baik Tingkat I maupun Tingkat II senantiasa mengadakan evaluasi dan monitoring, dengan cara mengadakan pengelompokan klasifikasi menjadi klasifikasi A, B, C dan BDK, hal ini diperlukan mengingat tidak semua koperasi berada pada tingkat manajemen yang sehat, dengan cara pengelompokan koperasi ini, pihak pembina dan pelaksana lebih mudah mengevaluasi kondisi koperasi sekarang dan masa yang akan datang, keadaan ini dapat terlihat pada tabel 6 berikut ini :

TABEL 6 : KLASIFIKASI KOPERASI DIKOTAMADYA SAMARINDA TAHUN 1997

NO	JENIS KOPERASI	JUMLAH KOPERASI	KLASIFIKASI			TDK	
			A	B	C		BDK
1	KOPERASI UNIT DESA	23	6	4	3	10	
2	KOPERASI PEGAWAI NEGERI	113	6	20	1	76	
3	KOPERASI KARYAWAN	48	2	6	-	36	
4	KOPERASI ABRI	7	3	1	-	3	
5	KOPERASI JASA/SIMPAN PINJAM	8	-	-	-	8	
6	K.S.U	19	1	4	-	12	
7	KOPERASI INDUSTRI	12	-	-	-	11	
8	KOPERASI PASAR	3	1	1	-	1	
9	KOPERASI PERIKANAN	3	-	-	-	3	
10	KOPERASI PERTERNAKAN	2	-	-	-	2	
11	KOPERASI ANGKUTAN AIR/DARAT	4	1	-	1	2	
12	KOPERASI WANITA	10	-	3	-	7	
13	KOPERASI PENSIUNAN	4	-	1	1	2	
14	KOPERASI PEMUDA/MAHASISWA	4	-	1	-	3	
15	KOPERASI SEKOLAH	36	-	-	-	36	
16	KOPERASI LAIN-LAIN	4	1	-	-	-	
JUMLAH		300	21	41	6	212	13

SUMBER DATA : KANDEKOP TK II SAMARINDA

Secara lebih khusus, perkembangan koperasi baik koperasi unit desa maupun koperasi non KUD. Terutama yang meliputi jumlah koperasi, keanggotaan jumlah simpanan, cadangan, dana-dana, piutang, utang, modal, volume usaha dan hasil usaha, dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini :

**TABEL 7 : PERKEMBANGAN KOPERASI UNIT DESA  
DI KOTAMADYA SAMARINDA TAHUN 1997**

NO	URAIAN	S A T U A N	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	JUMLAH KOPERASI	Buah	23	23
2	KEANGGOTAAN	Orang	26.479	26.479
	- ANGGOTA PENUH	Orang	6.846	6.848
	- CALON	Orang	1.024	1.022
	- ANGGOTA YANG DILAYANI	Orang	18.607	18.609
3	JUMLAH SIMPANAN	Rupiah	110.371.000	
	- SIMPANAN POKOK	Rupiah	40.226.720	40.228.720
	- SIMPANAN WAJIB	Rupiah	49.548.100	49.648.100
	- SIMPANA SUKA RELA	Rupiah	20.596.180	20.596.180
4	CADANG/DONASI	Rupiah	216.411.570	216.511.550
5	DANA-DANA	Rupiah	9.183.980	9.363.980
6	PIUTANG	Rupiah	502.015.076	502.115.076
7	UTANG	Rupiah	412.022.188	410.022.185
8	PERMODALAN	Rupiah	5.339.882.570	5.340.882.570
9	VOLUME SAHA	Rupiah	4.409.349.500	4.409.550.500
10	S.H.U	Rupiah	219.411.570	219.500.570

SUMBER DATA : KANDEPKOP TK II SAMARINDA

TABEL 8 : PERKEMBANGAN KOPERASI UNIT DESA NON KUD  
DI KOTAMADYA SAMARINDA TAHUN 1997

NO	URAIAN	S A T U A N	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	JUMLAH KOPERASI	Buah	270	300
2	KEANGGOTAAN	Orang		
	- ANGGOTA PENUH	Orang	59.791	59.998
	- CALON	Orang	8.000	7.122
	- ANGGOTA YANG DILAYANI	Orang	37.400	37.600
3	JUMLAH SIMPANAN	Rupiah	1.014.907.950	101.881.450
	- SIMPANAN POKOK	Rupiah	370.460.450	340.760.450
	- SIMPANAN WAJIB	Rupiah	377.747.500	337.920.500
	- SIMPANA SUKA RELA	Rupiah	266.700.500	266.200.500
4	CADANG/DONASI	Rupiah	311.972.400	311.299.700
5	DANA-DANA	Rupiah	21.545.000	21.665.000
6	PIUTANG	Rupiah	912.922.500	912.200.500
7	UTANG	Rupiah	500.100.000	500.260.300
8	PERMODALAN	Rupiah		
9	VOLUME SAHA	Rupiah	6.329.488.000	6.329.638.000
10	S.H.U	Rupiah	315.800.100	315.800.100

SUMBER DATA : KANDEPKOP TK II SAMARINDA

Dengan membandingkan tabel 7 dan tabel 8 tersebut, terlihat berbagai perubahan dari kedua jenis koperasi dimana terlihat baik dari segi jumlah maupun hal-hal lainnya dalam masa triwulan III dan IV pada tahun 1997.

### C. Perkembangan Modal Dan Volume Usaha Koperasi Unit Desa Di Kotamadya Samarinda

Sampai pada triwulan VI pada tahun 1997, perlunya modal koperasi dan volume usaha koperasi telah memperlihatkan adanya perubahan yang terfluktuasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9 : Jumlah Modal dan Volume Usaha Koperasi Di Kotamadya Samarinda Tahun 1997  
(dalam Rp. 000.00,-)

Tahun	Modal (Rp)			Volume Usaha (Rp)
	Sendiri	Luar	Jumlah Modal	
1993	258.554	197.824	456.378	4.385.801
1994	259.452	651.241	910.693	5.847.735
1995	579.754	559.841	839.595	3.829.476
1996	286.918	649.971	936.889	7.245.438
1997	292.943	694.169	987.112	7.921.901
Rata-rata	X= 275.524,2	X = 550.609.2	X= 826.133,4	X= 5.846.070,2

Sumber Data : Kandep Koperasi TK II Samarinda.

Dengan demikian terlihat rata-rata perkembangan modal koperasi dan volume, usaha koperasi di Kotamadya

Samarinda untuk KUD dimana rata-rata modal sendiri adalah sebesar Rp. 275.524,2 dan modal luar adalah sebesar Rp. 550.609,2 hal ini masih menunjukkan bahwa modal yang berasal dari luar masih dominan di Koperasi KUD Kotamadya Samarinda.

Adapun perkembangan jumlah modal dan volume usaha koperasi NON KUD, pada tahun 1997, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 9 : Jumlah Modal dan Volume Usaha Koperasi  
NON KUD Di Kotamadya Samarinda Tahun 1997  
(dalam Rp. 000.00,-)

Tahun	Modal (Rp)			Volume Usaha (Rp)
	Sendiri	Luar	Jumlah Modal	
1993	822.171	955.168	1.777.339	6.945.013
1994	1.220.021	1.242.044	2.462.065	7.726.845
1995	1.607.082	1.055.400	2.662.482	4.817.402
1996	1.802.922	3.721.892	5.542.814	8.036.562
1997	1.941.367	4.158.689	6.099.965	19.498.096
Rata-rata	X=1.482.312,6	X =2.226.620,4	X=3.708.933	X= 9.404.783,6

Sumber Data : Kandep Koperasi TK II Samarinda.

Tabel 10 tersebut menunjukkan jumlah rata-rata modal sendiri pada koperasi non KUD di Kotamadya Samarinda adalah sebesar Rp. 1.482.312,6 dan modal luar sebesar Rp. 2.226.620,4 dengan volume usaha sebesar Rp. 9.404.783,6 apabila dibandingkan tabel 9 dan 10

tersebut maka rata-rata jumlah modal koperasi KUD dan NON KUD, masih terlihat jumlah yang lebih besar untuk jumlah koperasi NON KUD, hal ini menunjukkan koperasi NON KUD jumlah lebih besar baik dalam modal maupun volume usaha.

Dengan demikian untuk keperluan analisis maka jumlah modal dan volume usaha KUD maupun Non KUD di gabung untuk mencari pengaruhnya terhadap volume usaha.

Tabel 11 : Jumlah Metode KUD dan NON KUD  
Serta Volume Usaha Tahun 1997

Tahun	Modal (Rp)			Volume Usaha		
	K U D	NON KUD	Jlm Modal	K U D	NON KUD	Jumlah
1993	456.378	1.777.339	2.223.717	4.385.801	6.945.013	11.330.814
1994	910.693	2.462.065	3.372.758	5.847.735	7.726.845	13.574.580
1995	839.595	2.662.482	3.502.077	3.829.476	4.814.402	8.646.878
1996	936.889	5.542.814	6.479.703	7.245.438	8.036.562	15.282.000
1997	987.112	6.099.965	7.087.077	7.927.901	19.498.096	27.419.997

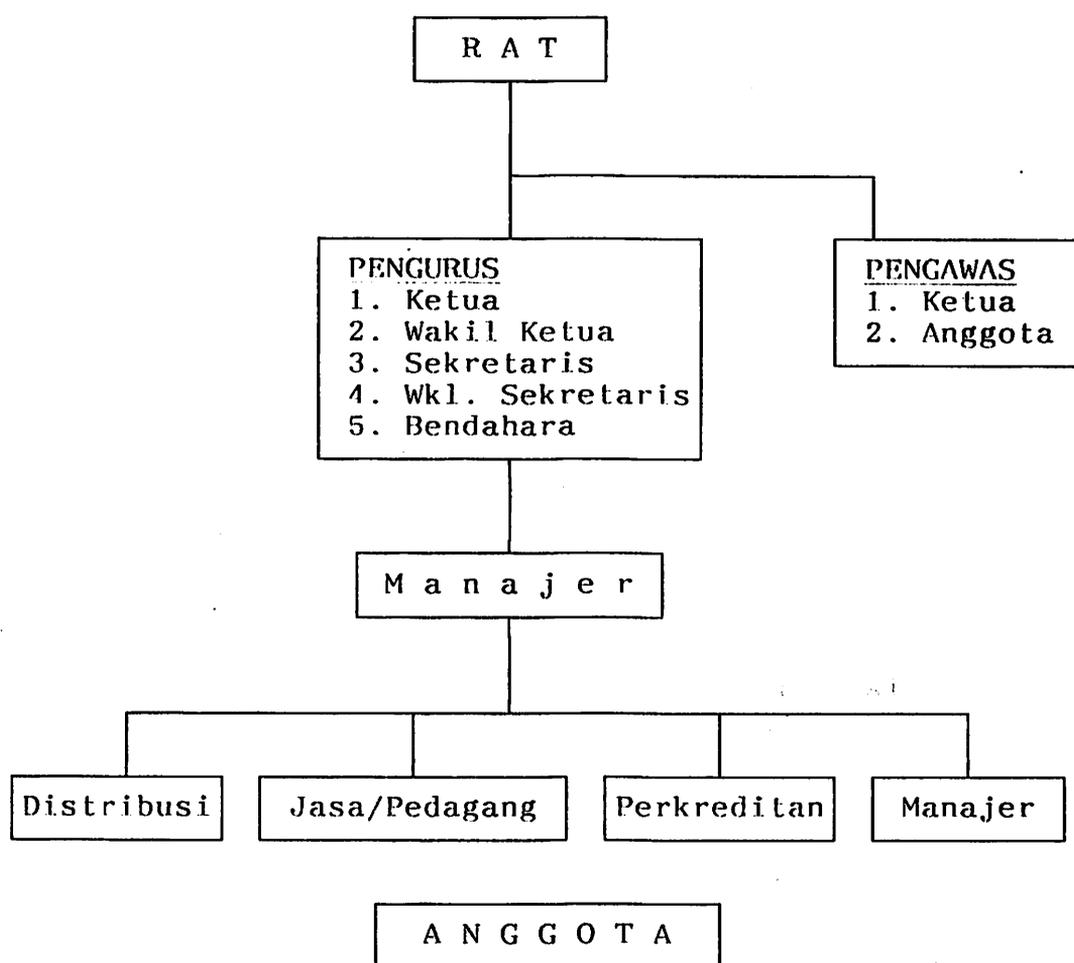
Sumber Data : Kandep Koperasi TK II Samarinda

#### D. Struktur Organidadi Dan Jumlah Tenaga Kerja Pada Koperasi Di Kotamadya Samarinda

Pada umumnya struktur organisasi perkoperasian di Kotamadya Samarinda baik KUD maupun NON KUD, mempunyai struktur yang sama, walaupun berbeda biasanya perbedaan tersebut hanya pada tingkat operasional yang disesuaikan dengan ruang lingkup usaha yang di jalankan oleh

koperasi yang bersangkutan struktur organisasi tersebut, adalah sebagai berikut :

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dan Jumlah Tenaga Kerja Pada Koperasi Di Kotamadya Samarinda



Sumber Data : Kakandep TK.II Samarinda

Sedangkan jumlah tenaga kerja sampai pada tahun 1997 kegiatan perkoperasian tersebut terlihat pada tabel 12 berikut ini :

Tabel 12 : Jumlah Tenaga Kerja Koperasi

Di Kotamadya Samarinda Tahun 1997

No	S t a t u s	Jumlah Tenaga Kerja
1	Pengurus	1.304 Orang
2	Pengawas	780 Orang
3	Manajer	72 Orang
4	Karyawan	971 Orang

## BAB V

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis

Di dalam bab ini yang akan dianalisis adalah Pengaruh Modal Terhadap Volume Usaha Koperasi di Kotamadya Samarinda, sesuai dengan landasan teori yang dikemukakan bahwa besarnya modal koperasi adalah merupakan variabel bebas ( independent variabel = X ) dan variabel Koperasi merupakan variabel tidak bebas (dependent variabel = Y) dimana periode 5 tahun dari tahun 1993 sampai tahun 1997.

Rumus yang dipergunakan untuk mencari pengaruh dan hubungan antara X dan Y adalah :

$$Y = a + b X$$

Perhitungan untuk mencari rumus dapat terlihat sebagai berikut :

TABEL 13: ANALISIS REGRESI MODAL KOPERASI TERHADAP VOLUME USAHA KOPERASI DI KOTAMADYA SAMARINDA

TAHUN	MODAL KOPERASI (X)	VOLUME USAHA (Y)	XY	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	Y	(Y - Y) <sup>2</sup>	(X - X) <sup>2</sup>
1993	2.233.717	11.330.814,00	25.309.607,96	4.989.415,69	128.387.028,60	57.100,821	14.597.992,25	5.296.441,96
1994	3.372.758	13.574.580,00	45.784.410,88	11.375.779,84	184.269.765,20	11.340,88	4.989.436,24	1.350.941,29
1995	3.502.077	8.646.878,00	30.282.308,49	12.264.704,41	74.768.879,61	11.775,71	9.789.597,82	1.067.089,00
1996	6.479.703	15.282.000,00	99.022.775,40	41.986.512,09	233.539.524,00	21.789,38	42.345.995,77	3.781.469,16
1997	7.087.077	27.419.997,00	194.328.282	50.226.984,41	751.856.400,00	23.832,07	12.873.246,71	6.512.704,00
	22.675.332,00	76.254.269,00	394.727.384,73	120.843.396,44	1.372.821.597,41	74.448.115,20	84.596.268,79	18.008.645,41

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{(\Sigma Y) (\Sigma X^2) - (\Sigma X) (\Sigma XY)}{n (\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2} \\
 &= \frac{(76.254,3) (120.843,4) - (22.675,3) (394.727,3)}{5 (120.843,4) - (22.675,3)^2} \\
 &= \frac{9.214.828.877 - 8.263.901.976}{604.217 - 514.169.230,1} \\
 &= \frac{950.926.901}{- 513.565.013} \\
 &= 1,851
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{(n) (\Sigma XY) - (\Sigma XY) (\Sigma Y)}{(n) (\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2} \\
 &= \frac{(5) (364.445,1) - (76.254,3) (22.675,3)}{(5) 120.843,4 - 22,675,3)^2} \\
 &= \frac{1.822.225,5 - 1.729.089,129}{604.217 - 514.169.230,1} \\
 &= \frac{1.727.266.900}{513.565.013} \\
 &= 3,363
 \end{aligned}$$

Sehingga persamaan Raris Regresinya, adalah :

$$Y = 1,851 + 3.363 X$$

Selanjutnya untuk menguji kebenaran terhadap koefisien Regresi yang sudah diperoleh, maka digunakan uji "t" test sebagai berikut:

$$t = \frac{(b - b_0) \sum (X - X^2)}{Tu}$$

dimana :

$$Tu = \frac{\sum (Y - \bar{Y})^2}{n - k} = \frac{84.596.268,79}{5 - 2}$$

$$= 5.310,25$$

sehingga :

$$t = \frac{3.363 \quad 18.008.645,41}{5.310,25}$$

$$= \frac{(3.363) (4243.659)}{5.310,25}$$

$$= 2,6875$$

Apabila digunakan tingkat keyakinan (LOC 95 %, dengan n-2) maka, : t datar = 2,23

$$t_h > t_d = 2,6875 > 2,23$$

Hal ini berarti memang benar ada pengaruh antara modal koperasi dengan volume usaha tersebut.

Untuk menentukan hubungan antara variabel X dan Y maka perlu dicari koefisiensi korelasi sebagai berikut :

$$R = \frac{n (\sum XY) - (\sum X) (\sum Y)}{n (\sum X^2) - (\sum X)^2 \quad n (\sum Y^2) - (\sum Y)^2}$$

$$= \frac{5 (364.445,3) (33.675,3) - (22.675,3) (76.254,3)}{5 (120.843,4) - (22.675,3)^2 \quad 5 (1372.812,6) - (76.254,3)^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1.822.226,5 - 1.729.089.120}{604.216.982 - 514.169.230,1 \quad 6.864.108 - 5.814.718.268} \\
 &= \frac{93.173,4}{97.207,9} \\
 &= 0.9581
 \end{aligned}$$

Maka berdasarkan hitungan korelasi tersebut besarnya korelasi adalah positif 0,9581, sehingga dapat dikatakan hubungan variabel X dan Y adalah sangat tinggi.

Sedangkan untuk menguji koefisiensi korelasi, maka digunakan uji "t korelasi" sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 t_h &= \frac{r \quad n - 2}{1 - r^2} \\
 &= \frac{0,9581 \quad 5 - 2}{1 - (0.9581)^2} \\
 &= \frac{1,6594}{0.2865} \\
 &= 5,7919
 \end{aligned}$$

Nilai t daftar pada IOC 95 % adalah 2,35 sehingga  $t_h > t_d$  atau  $5,7919 > 2,35$ , dengan demikian hipotesis yang dikemukakan telah terbukti kebenarannya.

## B. Pembahasan

Dari analisis data di peroleh persamaan regresinya adalah :

$$Y = 1,851 + 3,363 X$$

Persamaan tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap perambahan modal koperasi di Kotamadya Samarinda maka akan menyebabkan pertambahan volume usaha koperasi tersebut dengan kata lain bila terjadi pertambahan modal koperasi sebesar satu juta rupiah maka akan menambah hasil usaha koperasi tersebut sebesar Rp. 336.300 dengan asumsi bahwa barang dijual termasuk dalam sirkulasi penjualan yang cepat dan faktor lain dalam keadaan konstan. Jadi apabila akan memperbesar volume usaha koperasi tersebut maka modal yang ada di dalam koperasi juga harus ditambah atau diperbesar.

Kemudian kalau kita lihat hasil koefisien korelasinya adalah positif dan hampir mendekati satu yaitu sebesar 0.9581 atau 95,81 %, dimana kalau suatu koefisiensi korelasi mendekati satu maka berarti bahwa korelasinya itu sangat kuat sekali atau mempunyai pengaruh yang kuat antara variabel independent terhadap variabel dependennya. Begitu pula dengan hasil analisis ini dimana mempunyai korelasi yang kuat sekali, ini terbukti bahwa koefisien korelasi dari analisis ini setelah diuji ternyata test hitungnya lebih besar dari pada test daftarnya dengan demikian tentu saja korelasi dari analisis ini dapat diterima dan hal ini menunjukkan bahwa walaupun koperasi hanya merupakan kumpulan orang-orang tetapi modal memegang peranan yang sangat penting di dalam mengembangkan atau meningkatkan volume usaha

koperasi tersebut. Jadi di sini modal koperasi benar-benar sangat berpengaruh di dalam meningkatkan volume usaha koperasi itu tetapi yang tetapi yang dianggap penulis paling dominan adalah modal dan sistem manajemennya karena dengan modal yang sangat besar dan sistem manajemen yang baik tentu saja koperasi tersebut dapat mengembangkan usahanya, lebih-lebih didalam meningkatkan hasil usahanya.

**BAB VI**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa modal mempunyai peranan atau pengaruh di dalam meningkatkan volume Usaha Koperasi di Kotamadya Samarinda, ini dapat diketahui dari persamaan regresinya yaitu :  $Y = 1,851 + 3,363 X$  dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa apabila modal ditambah maka hasil usaha koperasi juga akan ditambah dengan asumsi faktor-faktor lain tetap.
2. Bahwa antara modal koperasi dengan hasil volume usaha terdapat hubungan yang erat sekali, ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis dimana koefisien korelasinya hampir mendekati satu yaitu :  $r = 0,9581$  atau 95,81 %.
3. Selanjutnya diketahui pula, bahwa besar kecilnya modal koperasi akan mempunyai pengaruh di dalam meningkatkan perkembangan volume usaha koperasi di Kotamadya Samarinda. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji test dimana test hitungnya lebih besar dari test daftar.

## B. Saran-saran

1. Diharapkan agar koperasi di Kotamadya Samarinda lebih meningkatkan jumlah anggotanya. Dengan meningkatnya jumlah anggota maka jumlah modal yang ada juga meningkat, atau dengan kata lain bahwa penambahan jumlah anggota identik dengan penambahan modal koperasi sehingga dengan modal yang kuat maka koperasi di Kotamadya Samarinda akan lebih meningkatkan atau mengembangkan usahanya.
2. Mengingat bahwa pentingnya modal dan sistem manajemen di dalam meningkatkan volume usaha koperasi di Kotamadya Samarinda, maka pada semua pengurusnya agar lebih membenahinya secara sungguh-sungguh kedua faktor tersebut kedua faktor ini penulis anggap merupakan faktor yang paling dominan diantara sekian faktor dalam menentukan keberhasilan koperasi.
3. Agar pihak Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Kalimantan Timur maupun Kantor Departemen Koperasi Kotamadya Samarinda memberikan penyuluhan dan pembinaan secara intensif kepada segenap pengurus koperasi agar para pengurus lebih giat dan terampil di dalam mengelola koperasinya sehingga hasil yang dicapai dapat lebih ditingkatkan lagi, selain itu pula akan tercipta atau terjalin kerjasama yang baik antara instansi pemerintah khususnya Departemen Koperasi selaku pembina dengan koperasi yang ada di Kotamadya Samarinda.

4. Agar para pengurus koperasi di Kotamadya Samarinda lebih mengadakan pendekatan dengan pihak swasta atau pengusaha untuk memperoleh dukungan modal sehingga dengan modal yang besardapat lebih mengembangkan usaha koperasi tersebut, terutama untuk mengadakan barang-barang yang belum ada pada koperasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANONIM. GBHN Bahan penataran, P-4, UUD 1945.. Edisi IV Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Pusat, Jakarta, 1990, halaman 97.
- . Bulletin Koperasi 1990. Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi, Jakarta.
- . 1982. Evaluasi Kegiatan Pembangunan Pelita III Departemen Perdagangan Dan Koperasi, Jakarta.
- . 1983. Koperasi Sebuah Pengantar. Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi Departemen Koperasi, Jakarta.
- . Laporan Tahunan, 1987-1991. Koperasi Pegawai Negeri Sartika, Kabupaten Berau.
- . Pesan Presiden Soeharto pada hari Koperasi ke 38 tahun 1985. Direktorat Jenderal Lembaga Bina Koperasi Departemen Koperasi, Jakarta.
- A., ENTANG RASA, 1985. Pembangunan Koperasi Teori Dan Kenyataan. Alumni Bandung.
- BARATHA, I NYOMAN, 1982. Masvarakt Desa dan Pembangunan Desa. Ghalia Indonesia Jakarta.
- KARTASAPOETRA, G. dkk. 1986. Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bina Aksara, Jakarta.
- PARTADIREDDJA, ATJE. 1986. Manajemen Koperasi Bharata Karya Aksara Jakarta.
- SUDJANA. 1986. Metode Statika, Edisi Empat Tarsito, Bandung.
- SUPRANTO, J. 1983. Ekonometrik Edisi Satu. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.

SUBYAKTO, HARISOYONO, dan BAMBANG TRI CAHYO. 1983. Ekonomi Koperasi. Edisi Pertama. Liberty, Yogyakarta.

WIDIYANTY, NINIK, dan Y.W. SUNINDHIA. 1989. Koperasi dan Perekonomian Indonesia. PT. Bina Aksara, Jakarta.